LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.013/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR: 188.45/703/KEP/35.07.13/2016 TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

**PERUBAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MALANG**

**TAHUN 2016-2021**

BAB I

PENDAHULUAN

* 1. **Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokmen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Dengan demikian, maka antara dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang harus selaras dan konsisten dengan terget capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang adalah suatu sub sistim Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pemerintah Kabupaten Malang dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang memiliki kedudukan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang memiliki kedudukan yang strategis dalam melaksanakan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 bahwa:

1. Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD;
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
3. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan dimaksud.

Sebagai perangkat Daerah yang memiliki posisi strategis, dalam mencapai tujuan, sasaran dan program diperlukan sistem yang terpadu dan berkelanjutan melalui penyusunan perencananaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Perencanaan strategis tentunya mampu menggambarkan bagaimana seluruh potensi yang ada mampu menangkap isu strategis dan direncanakan dalam pengambilan keputusan, kebijakan dan program kegiatan tahun-tahun berikutnya yang mampu dipertanggung jawabkan berdasar pada setiap strategi yang dicanangkan. Perencanaan strategis merupakan komitmen organisasi secara menyeluruh terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofis operasional dan prioritas-prioritas, merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam era otonomi daerah dan era global ini.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Rencana Pembangunan Tahunan) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang, serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

* 1. **Landasan Hukum**

Landasan hukum pembuatan rencana strategi adalah mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;**
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
26. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/703/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.
    1. **Maksud dan Tujuan**
27. Maksud
28. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
29. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke depan;
30. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
31. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
32. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
33. Tujuan
    1. Mendukung terwujudnya  *Good Governance* dan *Clean Government.* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Umum khususnya di bidang kesatuan bangsa dan politik yang merupakan penjabaran Visi-Misi Kabupaten Malang, serta selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
    2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang.
    3. **Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang ini adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BAB I** | **:** | **PENDAHULUAN** | |
|  |  | 1.1 | Latar Belakang |
|  |  | 1.2 | Landasan Hukum |
|  |  | 1.3 | Maksud dan Tujuan |
|  |  | 1.4 | Sistematika Penulisan |
| **BAB II** | **:** | **GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | |
|  |  | 2.1 | Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|  |  | 2.2 | Sumber Daya Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|  |  | 2.3 | Kinerja Pelayanan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **BAB III** | **:** | **ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | |
|  |  | 3.1 | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  | 3.2 | Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih |
|  |  | 3.3 | Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi |
|  |  | 3.4 | Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan kajian Lingkungan Hidup Strategis |
|  |  | 3.5 | Penentuan Isu-isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **BAB IV** | **:** | **TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | |
|  |  | 4.1 | Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  | 4.2 | Strategi Dan Kebijakan Jangka Menengah Badan  Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **BAB V** | **:** | **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | |
|  |  | 5.1 | Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik. |
| **BAB VI** | **:** | **INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD** | |
|  |  | 6.1 | Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD |
| **BAB VII** | **:** | **PENUTUP** | |

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**2.1** **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang**

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal 4 menyebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang Pemerintahan Umum bukan pelayanan dasar. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah dan memiliki tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :
2. Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan Politik.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Fungsi :
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Pengkoordinasian, pengintegrasian dan sinkronisasi kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pelaksanaan standar pelayanan minimal dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.
8. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.
9. Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang, memiliki struktur dipimpin seorang kepala Badan yang dibantu seorang Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang sebagaimana gambar dibawah ini.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MALANG**

**Lampiran Keputusan Bupati Malang**

Nomor : 27 TH 2008

Tanggal : 29 Pebruari TH. 2008

**KEPALA BADAN**

**SUB BIDANG BINA MASYARAKAT**

**SUB BIDANG BINA KETAHANAN IDEOLOGI**

**NEG & HAK ASASI MANUSIA**

**SUB BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN**

**SUB BAGIAN KEUANGAN**

**SUB BAGIAN PERENCANAAN EVAPOR**

**DAN PELAPORAN**

**BIDANG IDEOLOGI, HAK ASASI MANUSIA & WAWASAN KEBANGSAAN**

**BIDANG KEWASPADAAN DAERAH &**

**BINA MASYARAKAT**

**BIDANG KETAHANAN SENI BUDAYA,**

**AGAMA, KEMASY. & KETAHANAN EKONOMI**

**BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

**SUB BIDANG KELEMBAGAAN PARPOL**

**SUB BIDANG PENDIDIKAN POLITIK**

**DALAM NEGERI**

**SUB BIDANG KETAHANAN**

**SENI BUDAYA, AGAMA & KEMASY**

**SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI**

**SUB BIDANG KEWASPADAAN DAERAH**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN**

**SEKRETARIS**

**UPTD**

Dari struktur diatas dapat dijelaskan :

1. **Sekretariat ,**

Mempunyai tugas :

* 1. Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, dan urusan keuangan;
  2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan bidang tugasnya.

mempunyai fungsi :

* 1. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
  2. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
  3. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  4. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
  5. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
  6. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
  7. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, memiliki tugas :
   * + 1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
       2. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai;
       3. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan;
       4. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
       5. Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
       6. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
       7. Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
       8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Keuangan, memiliki tugas :
3. Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan;
4. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
5. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
6. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja sub bagian keuangan;
8. Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
9. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, memiliki tugas :
12. Menyusun rencana kegiatan sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
13. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
14. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
15. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
16. Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
17. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
18. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
19. **Bidang Ideologi, Hak Asasi Manusia dan Wawasan Kebangsaan**, mempunyai tugas :
    * + - 1. Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, hak asasi manusia dan wawasan kebangsaan;
          2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan bidang tugasnya.

Mempunyai fungsi :

1. Penghimpunan dan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, penyusunan program bidang ideologi, hak asasi manusia dan wawasan kebangsaan;
2. Penyusunan program ideologi negara, pemajuan pemasyarakatan dan pendidikan penghormatan hak asasi manusia;
3. Penyusunan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan;
4. Pengkoordinasian tugas dan program kegiatan ideologi negara,pemajuan pemasyarakatan dan pendidikan penghormatan hak asasi manusia dan wawasan kebangsaan dengan instansi dan atau lembaga terkait;
5. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan tugas dan kegiatan ideologi negara, pemajuan pemasyarakatan dan pendidikan penghormatan hak asasi manusia dan wawasan kebangsaan.
6. **Bidang Kewaspadaan Daerah dan Bina Masyarakat**, mempunyai tugas :
7. Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan daerah dan bina masyarakat;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan Kesatuan bangsa dan Politik sesuai dengan bidang tugasnya.

mempunyai fungsi :

* 1. Penghimpunan dan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, penyusunan program bidang kewaspadaan daerah dan bina masyarakat;
  2. Penyusunan program kewaspadaan nasional di bidang kewaspadaan nasional dan pembinaan masyarakat;
  3. Pengkoordinasian tugas dan program kegiatan kewaspadaan daerah dan pembinaan masyarakat dengan instansi dan/atau lembaga terkait;
  4. Pelaksanaan kegiatan kewaspadaan daerah dan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan komitmen persatuan dan kesatuan nasional;
  5. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan tugas dan program kegiatan kewaspadaan daerah dan pembinaan masyarakat.

1. **Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ketahanan Ekonomi,** mempunyai tugas :
2. Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ketahanan Ekonomi;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan bidang tugasnya.

mempunyai fungsi :

1. Penghimpunan dan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, penyusunan program bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ketahanan ekonomi;
2. Pelaksanaan program fasilitasi dan pelaksanaan kajian strategis bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ketahanan ekonomi;
3. Pengkoordinasian tugas dan program kegiatan fasilitasi pengkajian strategis bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ketahanan ekonomi;
4. Pelaksanaan kajian strategis di bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ketahanan ekonomi;
5. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan tugas serta program kegiatan fasilitasi kajian strategis bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyakatan dan ketahanan ekonomi.
6. **Bidang Politik Dalam Negeri,** mempunyai tugas :
7. Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang politik dalam negeri;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan bidang tugasnya.

mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya untuk perbaikan proses politik dalam negeri;
2. Penghimpunan data dan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program bidang politik dalam negeri;
3. Pengkoordinasian, komunikasi dan konsultasi dengan partai politik, organisasi kepemudaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk penyempurnaan sistem demokrasi;
4. Pengkoordinasian tugas dan program kegiatan bidang politik dalam negeri dengan instansi dan/atau lembaga terkait;
5. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan tugas dan program kegiatan bidang politik dalam negeri.
6. **UPTdan Kelompok Jabatan Fungsional** :

Sampai tahun 2018 belum dibentuk UPT dan pengisian Jabatan Fungsional.

* 1. **Sumberdaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
  2. **Sumber Daya Manusia**

### Jumlah Pegawai 23 (dua puluh tiga) dan Tenaga Kontrak 3 ( tiga ) orang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seluruh personil berjumlah 26 (dua puluh enam) orang dengan rincian :

**Berdasarkan Pendidikan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nomor | Pendidikan | Jumlah |
| 1. | S 2 | 9 |
| 2. | S 1 | 13 |
| 3. | D-IV | - |
| 3. | Sarmud / D-3 | - |
| 4. | SMA | 4 |
| 5. | SMP | - |
| J u m l a h | | **26** |

**Berdasarkan Pangkat / Golongan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nomor | Pangkat/Gol.Ruang | Jumlah |
| **1.** | **Golongan IV** | **6** |
|  | Pembina Utama Muda | 1 |
|  | Pembina | 5 |
| **2.** | **Golongan III** | **17** |
|  | Penata Tk. I | 6 |
|  | Penata | 6 |
|  | Penata Muda Tk. I | 4 |
|  | Penata Muda | 1 |
| **5.** | **T. Kontrak /Non Golongan** | **3** |
|  | **J u m l a h** | **26** |

**Berdasarkan Eselon**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nomor | Eselon | Jumlah |
| 1. | Eselon II-b | 1 |
| 2. | Eselon III-a | - |
| 3. | Eselon III-b | 4 |
| 4. | Eselon IV-a | 10 |
|  | J u m l a h | 15 |

**Staf Pelaksana**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nomor | Staf Pelaksana | Jumlah |
| 1. | Staf | 11 |
|  | J u m l a h | 11 |

**Berdasarkan Gender**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nomor | Jenis Kelamin | Jumlah |
| 1. | P r i a | 14 |
| 2. | Wanita | 12 |
|  | J u m l a h | 26 |

**Pendidikan Penjenjangan Aparatur**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nomor | Diklat penjenjangan | Jumlah |
| 1. | Pim II | 1 |
| 2. | Pim III | 5 |
| 3. | Pim IV | 9 |
|  | J u m l a h | 15 |

**Peralatan Kerja Utama**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nomor | Jenis | Jumlah | Keterangan |
| 1 | Meja + Kursi Eselon II | 1 Set | baik |
| 2 | Meja + Kursi Eselon III | 5 Set | baik |
| 3 | Meja + Kursi Eselon IV | 11 Set | baik |
| 4 | Meja + Kursi Staf | 12 Set | baik |
| 5 | Almari | 6 buah | baik |
| 6 | Telepon | 1 buah | baik |
| 7 | Komputer | 8 Buah | baik |
| 8 | Laptop | 3 buah | baik |
| 9 | Printer | 4 Buah | baik |
| 10 | AC | 6 buah | baik |
| 11 | TV | 2 buah | baik |
| 12 | In fokus dan layar | 1 set | Baik |
| 13 | Kendaraan roda 4 | 5 buah | Baik, 3 Buah dipinjam pakai (PEPABRI, PWRI, KODIM ) |
| 14 | Sepeda Motor Honda | 1 buah | baik |
| 10 | Meja Tamu | 3 set | baik |
| 11 | Meja rapat | 1 set | baik |

* 1. **Sumber Daya Anggaran** **Tahun 2011 - 2015**

**Perkembangan Anggaran Tahun 2011 – 2015 dan**

**Proyeksi Tahun 2016 - 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun | Anggaran | Keterangan |
| 2011 | 2.976.111.000.- | Termasuk gaji PNS |
| 2012 | 3.449.505.000.- | Termasuk gaji PNS |
| 2013 | 2.027.732.000.- | Termasuk gaji PNS |
| 2014 | 3.294.229.000.- | Termasuk gaji PNS |
| 2015 | 3.557.342.490,- | Termasuk gaji PNS |
|  | Proyeksi Anggaran |  |
| 2016 | 2.796.018.309 | Termasuk gaji PNS |
| 2017 | 3.118.365.764 | Termasuk gaji PNS |
| 2018 | 4.666.754.200 | Termasuk gaji PNS |
| 2019 | 6.334.011.668 | Termasuk gaji PNS |
| 2020 | 6.334.011.668 | Termasuk gaji PNS |
| 2021 | 6.589.144.668 | Termasuk gaji PNS |

* 1. **Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi memberikan pelayanan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik untuk itu untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan kepada masyarakat melalui :

* + - 1. Meningkatnya cakupan pencegahan dan tangkal dini konflik sosial;
      2. Meningkatnya keaktifan dan pemberdayaan Forum Kerukunan umat beragama;
      3. Meningkatnya cakupan pendidikan wawasan kebangsaan,
      4. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan politik.

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **INDIKATOR KINERJA SESUAI TUPOKSI** | **TARGET SPM** | **TARGET IKK** | **TARGET INDIKATOR LAINNYA** | **TARGET RENSTRA PD** | | | | | **REALISASI CAPAIAN TAHUN** | | | | | **RASIO CAPAIAN PADA** | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 1 | Presentase penurunan angka potensi konflik | - | - | - | 15% | 15% | 15% | - | - | 12% | 13% | 15% | - | - | 80% | 87% | 100% | - | - |
| 2 | Persentase Penanganan Konflik Sosial yang terfasilitasi | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% |
| 3 | Persentase Cakupan Pencegahan Dini Potensi Konflik | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Persentase Tingkat Keaktifan FKUB | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Persentase Peningkatan Cakupan Pendidkan Wawasan Kebangsaan | - | - | - | 20% | 20% | 20% | 100% | 100% | 20% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat | - | - | - | 15% | 15% | 15% | 100% | 100% | 12% | 12% | 15% | 100% | 100% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% |

## Keterangan :

- indikator Kinerja 1 hanya dilaksanakan sampai dengan tahun 2015, sedangkan untuk tahun 2016 telah berubah disesuaikan dengan kondisi yang ada menjadi indikator 2 untuk tahun 2016 sampai dengan sekarang.

* 1. **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Dari identifikasi permasalahan pelayanan diperoleh hal-hal sebagai berikut:

* + 1. Kualitas dan kwantitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi,
    2. Terbatasnya Anggaran, sarana dan prasarana;
    3. SOP penyelenggaraan pelayanan belum memadai.
  1. **Telaahan Visi Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021**

Visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan visi dan misi yang sebelumnya telah menjadi materi kampanye oleh pasangan pemenang pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Malang Tahun 2015 lalu. Hal ini ditegaskan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyebutkan bahwa setiap calon wajib untuk menyertakan visi pada saat mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Maka dari itu, mengacu pada hasil Pemilukada Tahun 2015, RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ini merupakan hasil perumusan dari pasangan pemenang Pemilukada Kabupaten Malang yang ditetapkan pada tahun 2016 yakni Dr. H.Rendra Kresna dan H. Sanusi.

Visi Pembangunan Kabupaten Malang berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Malang sebagaimana tertuang dalam RPJPD 2005-2025, capaian pembangunan tahun 2010-2015, memperhatikan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah.Visi Kabupaten Malang juga mempunyai semangat untuk menjalankan komitmen pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia, salah satu komitmen tersebut adalah sektor pembangunan desa. Kabupaten Malang pada lima tahun kedepan akan memperhatikan pembangunan desa sesuai dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini menjadi penting dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Malang yang luas membuat akses pelayanan dan informasi berpotensi untuk tidakterdistribusi secara cepat dan merata. Pembangunan desa setidaknya juga merupakan langkah kongkrit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan kabupaten secara umum.

Untuk mengupayakan hal itu*,* Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016.

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang yang berlandaskan pada sebuah nilai filosofis, yakni: *Pertama:* niat untuk konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi dan pembangunan, atau diberi istilah **Madep**. *Kedua* Untuk mewujudkan niat tersebut pemerintah berkomitmen untuk memiliki sikap kedisiplinan, bekerja keras dan produktif dalam pelaksanakan pembangunan, atau disebut dengan **Manteb**. Sedangkan untuk tujuan pembangunannya dalam 5 tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Malang menginginkan agar setiap pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, atau diberi istilah **Manetep**.

Dengan mempertimbangkan tiga landasan filosofis dan pedoman arah pembangunan di atas, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut: "**Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP"**, Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”.

* 1. **Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Propinsi**

Keterkaitan Visi Kabupaten Malang dengan Visi Nasional dan Visi provinsi adalah sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Visi RPJMD Kabupaten  Malang | Visi RPJMD Provinsi  Jawa Timur | Visi Ditjen Kesatuan Bangsa Dan Politik Kemendagri |
| Terwujudnya  Kabupaten Malang  yang Madep, Manteb  dan Manetep | Terwujudnya Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing” dengan Misi “ Makin Mandiri dan Sejahtera bersama wong cilik | Terwujudnya Persatuan Dan Kesatuan Bangsa melalui system politik yang demokratis dalam wadah NKRI. |

Untuk mewujudkan visi Visi Ditjen Kesatuan Bangsa Dan Politik Kemendagri maka dirumuskan misi :

1. Memelihara dan memantapkan keutuhan NKRI ;
2. Memantapkan system politik dalam negeri yang demokratis dalam NKRI ;
3. Memantapkan wawasan kebangsaan , ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, social, budaya dan hukum segenar warga negara, dengan didukung berperannya institusi-institusi social dan budaya masyarakat bagi penguatan integrasi social.

Adapun tujuannya adalah memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Lebih lanjut sebagai derivasi dari tujuan tersebut ditetapkan sasaran stratefgis sebagai berikut;

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi ;
2. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat;
4. Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik.

Sedangkan Visi Gubernur Jawa Timur yaitu “ Terwujudnya Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing” dengan Misi “ Makin Mandiri dan Sejahtera bersama wong cilik” khususnya khususnya Tujuan Misi ke 5 yaitu : “Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial” dengan fokus program sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama;
2. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib;
3. Meningkatkan penegakan supremasi hukum dan penghormatan HAM yang berkeadilan

Selaras dengan Perencanan Strategis Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri serta Perencanaan Strategis Bakesbangpol Propinsi Jawa Timur maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang melalui misi 1 yaitu Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan **revolusi mental** yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum. Penjelasan Misi 1 dijabarkan menjadi:

1. Memfasilitasi forum-forum kerukunan antar umat beragama.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menegakkan peraturan yang berlaku.
3. Memfasilitasi dan berperan aktif dalam acara kebudayaan dan seni masyarakat.

Sedangkan Tujuan dan sasaran misi 1 adalah sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| Tujuan | Sasaran |
| Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan didaerah | 1. Meningkatnya kerukunan kehidupan umat beragama; Ketentraman dan ketertiban umum; (**urusan Kesbangpol**); 2. Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah; (**urusan Kesbangpol)**; 3. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, (urusan Pemberdayaan Keluarga) 4. Mengembangkan potensi bakat dan keterampilan pemuda dan olahraga dalam meningkatkan prestasinya; (urusan Pemuda dan olah raga). |

Sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016 – 2021 maka target indikator tujuan yang akan dicapai adalah :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tujuan | Indikator Tujuan | Target Indikator Tujuan s/d Tahun 2021 | |
| **Misi I :**  Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supremasi hukum | | | |
| Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan  masyarakat terhadap peraturan diberlakukan didaerah | Persentase konflik social yang difasilitasi | | 100% |

* 1. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

RTRW Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 membagi wilayah pengembangan menjadi 6 WP. Guna efektifitas dan efisiensi percepatan dan pemerataan pembangunan Kabupaten Malang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan, yaitu

1. WP I lingkar Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang (meliputi Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Pakis), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), industri, pariwisata serta transportasi udara, dengan prioritas pengembangan infrastruktur; 1) Peningkatan akses jalan tembus terkait Kota Malang; 2) Pengembangan jalan Malang–Batu; 3) Peningkatan konservasi lingkungan; 4) Peningkatan kualitas koridor jalan Kota Malang - Bandara Abdul Rahman Saleh dan pengembangan permukiman.
2. WP II Kepanjen dengan pusat di perkotaan Kepanjen (meliputi Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Pagelaran), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa skala Kabupaten, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), peternakan, perikanan darat, industri, pariwisata, kehutanan serta pariwisata pilgrim, dengan prioritas pengembangan infrastruktur: 1) Jalan Lingkar Timur dan penyelesaian Jalan Lingkar Barat Kepanjen; 2) Peningkatan akses menuju Gunung Kawi dan Wisata Ngliyep; 3) Jalan penghubung antar sentra ekonomi di perdesaan dengan pusat kecamatan; 4) Percepatan penyelesaian JLS; 5) Peningkatan sediaan air bersih pada kawasan rawan kekeringan dan pengembangan permukiman.
3. WP III Ngantang dengan pusat pelayanan di perkotaan Ngantang (meliputi Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon, Kecamatan Kasembon), memiliki potensi pengembangan di sub sektor pariwisata antara lain Bendungan Selorejo, pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan), peternakan, industri serta perikanan air tawar, dengan prioritas pengembangan infrastruktur: 1) Jalan menuju sentra produksi pertanian di perdesaan; 2) Jalan penghubung dengan Blitar dari Ngantang; 3) Peningkatan pengelolaan tanah pada kawasan rawan longsor sepanjang Pujon–Ngantang–Kasembon–Kandangan; 4) Peningkatan sediaan air di perdesaan dan penunjang irigasi.
4. WP IV Tumpang dengan pusat pelayanan di perkotaan Tumpang (meliputi Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, Kecamatan Jabung), memiliki potensi pengembangan sub sektor pariwisata, pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), Peternakan, Perikanan serta Industri; dengan prioritas pengembangan infrastruktur: 1) Jalan utama Pakis–Tumpang–Poncokusumo–Ngadas–Bromo; 2) Jalan pada pusat ekonomi di perdesaan; 3) Jalan tembus utama antar kecamatan; 4) Perbaikan sistem irigasi dan sediaan air; di WP ini dikembangkan Kawasan Agropolitan Poncokusumo termasuk pengembangan kawasan wisata menuju Gunung Bromo dan kawasan Minapolitan Wajak.
5. WP V Turen dan Dampit (meliputi Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading) dengan pusat pelayanan sosial di Turen, dan pusat pelayanan ekonomi di Dampit, memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (tanaman pangan dan perkebunan), peternakan, perikanan laut, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan menuju perdesaan pusat produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan (untuk perikanan dan pariwisata), 3) Jalan khusus penunjang ekonomi sekaligus untuk evakuasi bencana (bila terjadi letusan Gunung Semeru) dan kemungkinan tsunami, 4) Peningkatan irigasi dan sediaan air; dikawasan ini dikembangkan peternakan kambing Peranakan Etawa (PE).
6. WP VI Sumbermanjing Wetan dengan pusat pelayanan di perkotaan Sendangbiru (meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Bantur), memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (perkebunan, tanaman pangan), perikanan laut, pertambangan, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan kearah perdesaan pusat produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan terutama ke Sendangbiru dan Bajulmati (untuk perikanan dan pariwisata), 3) Pengembangan pelabuhan berskala nasional, 4) Jalur jalan khusus untuk evakuasi bencana (kemungkinan tsunami), 5) Peningkatan irigasi dan sediaan air; dikawasan ini dikembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sendangbiru dan direncanakan pembangunan pelabuhan umum.

Meskipun tidak berkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat mendukung dalam meningkatkan stabilitas keamanan wilayah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senantiasa mengoptimalkan koordinasi dengan Jajaran Kominda dan melaksanakan pemantauan- pemantauan ke wilayah Kabupaten Malang guna mendapatkan informasi secara dini dan mampu memberikan masukan terkait kondisi ketahanan ekonomi, sosial, budaya masyarakat sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang. Dengan terciptanya stabilitas keamanan wilayah tentunya juga menimbulkan daya tarik bagi para investor dan memberikan rasa aman bagi semua stake holder yang turut serta dalam percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang.

* 1. **Penentuan Isu - isu strategis**

Kokohnya NKRI merupakan syarat utama bagi kelangsungan pemerintah dan pembangunan nasional, oleh karena itu upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi. Secara obyektif bangsa Indonesia dibangun diatas kemajemukan sehingga berpotensi terhadap kerawanan sosial, politik dan kewilayahan yang dapat mengarah timbulnya konflik sosial yang berdemensi horizontal maupun vertikal. Selain kemajemukan masyarakat Indonesia yang rawan konflik, masih terdapat beberapa permasalahan lain yang saling mengkait dalam pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi, serta rendahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum yang merupakan hambatan yang signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah:

* + 1. Tantangan

1. Globalisasi ;
2. Menurunnya kesadaran masyarakat akan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, munculnya fenomena ideologi2 yang bertentangan dengan Pancasila ;
3. Luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang sangat besar berdampak signifikan terhadap monitoring dan evaluasi keamanan dan ketertiban serta pelayanan kepada masyarakat.
   * 1. Peluang
        + 1. Adanya regulasi yang terkait dengan kesatuan bangsa dan politik, seperti keputusan 2 (dua) Menteri tentang Peraturan Bersama Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.
          2. Komitmen *dan political will* yang mendukung;
          3. Keterbukaan informasi dan berkembangnya Tehnologi informasi;
          4. Partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pencegahan dini konflik sosial.

Disamping fenomena faktual tersebut diatas, kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran demokrasi dan berpolitik, serta kelestarian lingkungan sehingga berpengaruh terhadap penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada gilirannya akan menjadi faktor ancaman dalam perwujudan ketahanan bangsa dan kehidupan bermasyarakat.

Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini dapat diklasifikasikan isu strategis sebagai berikut :

1. Pendidikan politik masyarakat masih rendah.

Pendidikan politik masyarakat yang masih rendah dapat dilihat dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada serta masih maraknya konflik-konflik yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu;

1. Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah

Permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan;

1. Harmonisasi kehidupan bermasyarakat cenderung menurun

Menurunnya harmonisasi kehidupan bermasyarakat dapat dilihat dari kecenderungan semakin maraknya konflik dan kekerasan komunal (conflict and communal violence) di tengah masyarakat, seperti tawuran antar warga dan pertentangan antar komunitas/kelompok masyarakat.

1. Potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat

Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang tehnologi, informasi, budaya dan ekonomi memunculkan ekses-ekses negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konfensional. Adanya ancaman terorisme dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang/narkoba.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

# Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Selain itu sasaran juga merupakan dasar yang kuat untuk melihat pencapaian kinerja Kabupaten Malang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian seluruh sasaran yang ditetapkan diharapkan mampu mewujudkan tujuan yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat Kabupaten Malang. Dalam menindaklanjuti visi dan misi Kabupaten Malang berupaya untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 Badan Kesatuan Bangsa Dan politik dalam mendukung visi pembangunan adalah dengan melaksanakan misi pertama yaitu Memantap kan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supremasi hukum.

Pelaksanaan misi pertama ini untuk Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik memiliki tujuan dan dan sasaran yang berkaitan langsung dengan tujuan dan sasaran daerah.

Identifikasi indikator Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang diukur dengan jumlah konflik social yang terfasilitasi dibanding dengan jumlah konflik yang terjadi sampai dengan tahun 2021, dan target kinerja pelayanan untuk 5 (lima) tahun kedepan disajikan dalam tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan sasaran Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **MISI** | **TUJUAN**  **RPJMD** | **SASARAN RPJMD** | **TUJUAN PD** | **INDIKATOR TUJUAN PD** | **SASARAN PD** | **INDIKATOR SASARAN** | **FORMULA/**  **RUMUS** | **KONDISI AWAL KINERJA TAHUN 2017** | **TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN** | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Memantap kan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna  menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran,  budaya lokal dan supremasi hukum | Mewujudkan mentalitas  kehidupan sosial yang tertib  melalui terciptanya  kerukunan kehidupan umat  beragama dan kepatuhan  masyarakat terhadap  peraturan diberlakukan  didaerah | Persentase angka konflik ipoleksosbud hankam batas wilayah dan SARA | Meningkat  nya  kerukunan  kehidupan umat  beragama | Meningkat  nya kerukunan kehidupan umat beragama | Fasili-  tasi pena-nganan  Konflik sosial  cakupan pencegahan/tangkal dini konflik di masyarakat  keaktifan & pemberdayaan forum  kerukunan umat beragama (fkub  cakupan  pendidikan wawasan  kebangsaan  cakupan  pendidikan POLDAGRI | Persentase Penangan an Konflik sosial yang terfasilitasi  Persentasi Cakupan Pencegahan Dini Konflik  Persentase Tingkat Keaktifan FKUB  Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan  Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat | Σ konflik sosial yg terfasilitasi s/d tahun n    Σ konflik sosial s/d tahun n  Σ Potensi Konfik terdeteksi/Terbahas/tertangani  Σ Konflik yang dilaporkan  ΣAngg FKUB yang aktif  Σanggota FKUB  ΣPokmas yang Mendapat Nilai Baik  ΣPokmas yang memperoleh Penddkn kebangsaan  ΣMasyarakat/ Pokmas yang Mendapat Nilai Baik  ΣPokmas yang memperoleh Pendidikan Poldagri | 100%  100%    100%  100%  100%  100% | 100%  100%  100%  100 %  100%  100% | 100%  100%  100%  100 %  100%  100% | 100%  100%  100%  100 %  100%  100% | 100%  100%  100%  100 %  100%  100 |

# Strategi Dan Kebijakan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik untuk pelaksanaan pembangunan jangka menengah yaitu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021, dan terkait dengan fungsi organisasi maka digunakan strategi jangka menengah “Menginisiaasi forum-forum kerukunan kehidupan umat beragama”, yaitu dengan kebijakan Memfasilitasi kebijakan yang memperkuat kerukunan umat beragama dalam suasana saling menghormati.

Kebijakan ini akan didukung dengan 3 (tiga) program dari 4 (empat) program Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang ada yaitu :

* + - * 1. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
        2. Peningkatan Kewaspadaan Daerah;
        3. Pengembangan wawasan kebangsaan.

Secara lengkap strategi dan kebijakan ini dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **TUUJUAN RPJMD** | **SASARAN RPJMD** | **TUJUAN**  **PD** | **SASARAN PD** | **STRATEGI PD** | **KEBIJAKAN** | **PROGRAM PERIORITAS PD** |
|  | Mewujudkan mentalitas  kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya  kerukunan kehidupan umat  beragama dan kepatuhan  masyarakat terhadap  peraturan diberlakukan  didaerah | Persentase angka konflik ipoleksosbud hankam batas wilayah dan SARA | Meningkat nya  kerukunan  kehidupan umat  beragama | Fasilitasi penanganan semua Konflik | Menginisiasi forum-forum kerukunan kehidupan umat beragama | Memfasilitasi kebijakan yang memperkuat kerukunan umat beragama dalam suasana saling menghormati | 1. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2. Peningkatan Kewaspadaan Daerah 3. Pengembangan wawasan kebangsaan |

**BAB V**

**RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

# A. Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program-program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang selama Tahun Anggaran 2016-2021 :

* + - 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
* Penyediaan jasa surat menyurat
* Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
* Penyediaan jasa administrasi keuangan
* Penyediaan jasa kebersihan kantor
* Penyediaan alat tulis kantor
* Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
* Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan
* Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
* Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
  + - 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
* Pengadaan peralatan gedung kantor
* Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
* Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
* Pemelihraan rutin / berkala peralatan gedung kantor
  + - 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan kegiatan :
* Pendidikan dan pelatihan formal
  + - 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
* Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
* Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
  + - 1. Program Pendidikan Politik, dengan kegiatan :
* Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat
* Pembinaan Administrasi Partai Politik dan Pelaporan
  + - 1. Program pemeliharaan Kamtrantibmas, dengan kegiatan :
* Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Tindak Kriminal
* Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa
* Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
* Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
  + - 1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan :
* Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama
* Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat
* Sosialisasi Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
* Identifikasi dan inventarisasi keberadaan serta bantuan fasilitasi Ormas
  + - 1. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan :
* Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
* Bimtek RANHAM
  + - 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
* Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Uraian selengkapnya mengenai rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diuraikan dalam tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikator

Badan Kesatuan Bangsa Dan politik Tahun 2019 – 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKA TOR SASAR AN | PROGRAM/  KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT) | KONDISI KINERJA AWAL | | | KONDISI KINERJA TAHUN PERENCANAAN | | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KONDISI KINER JA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA | PD PENANGGUNG JAWAB |
| TH. 2017 | | | TH. 2018 | | TH. 2019 | | TH. 2020 | | TH. 2021 | |
| CAPAIAN | Rp. | SBR DANA | T | Rp. | T | Rp. | T | Rp. | T | Rp. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | **Mening**  **katnya**  **kerukunan**  **kehidupan umat**  **ber**  **agama** | **Mening**  **katnya kerukun-**  **an kehidup-**  **an umat beragama** | **Fasilitasi penangan**  **an semua Konflik sosial** | **Persentase Penangan-an Konflik sosial yang terfasilitasi** | **Program pelayanan administrasi perkantoran** | **Prosentase terlaksana**  **nya pelayanan administrasi perkantoran** | 100% | 546.228.839 | APBD | 12 bln | 671.433.000 | 12 bln | 516.947.000 | 12 bln | 516.947.000 | 12 bln | 568.641.700 | 100% |  |
| 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah registrasi surat masuk dan keluar | 2400 | 0 | APBD | 2400 | 0 | 0  surat | 0 | 0  surat |  | 0  surat | 0 | **2400** |  |
| 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik | Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik selama satu tahun | 12 Bln | 1.636.470 | APBD | 12 Bln | 3.600.000 | 12 Bln | 4.356.000 | 12 Bln | 4.356.000 | 12 Bln | 4.791.600 | **60**  **bln** |  |
| 1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah orang yang diberikan honor administrasi keuangan selama satu tahun | 6 Org | 60.885.000 | APBD | 6 org | 100.549.000 | 6 org | 40.656.000 | 6 org | 40.656.000 | 6 org | 44.721.600 | **12**  **org** |  |
| 1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah jasa kebersihan kantor selama satu tahun | 12 OB | 18.746.000 | APBD | 12 OB | 21.600.000 | 12 OB | 20.068.000 | 12 OB | 20.068.000 | 12 OB | 22.074.800 | **60 OB** |  |
| 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah pengadaan alat tulis kantor | 26 Jenis | 53.119.100 | APBD | 26 jenis | 62.335.000 | 26 jenis | 67.612.000 | 26 jenis | 67.612.000 | 26 jenis | 74.373.200 | **26 jenis** |  |
| 1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan | 6 jenis | 54.906.969 | APBD | 6 jenis | 53.929.000 | 6 jenis | 57.035.000 | 6 jenis | 57.035.000 | 6 jenis | 62.738.500 | **6**  **jenis** |  |
| 1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah exemplar bahan bacaan yang disediakan | 2 jenis | 5.220.000 | APBD | 2 jenis | 2.520.000 | 2 jenis | 5.535.000 | 2 jenis | 5.535.000 | 2 jenis | 6.088.500 | **2 jenis** |  |
| 1. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah penugasan dinas keluar daerah | 286  HOK | 133.230.300 | APBD | 286 HOK | 219.100.000 | 286 HOK | 160.628.000 | 286 HOK | 160.628.000 | 286 HOK | 176.690.800 | **1430 HOK** |  |
| 1. Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | Jumlah penugasan dinas ke dalam daerah | 483  HOK | 218.485.000 | APBD | 680  HOK | 207.800.000 | 680  HOK | 157.240.000 | 680  HOK | 157.240.000 | 680  HOK | 172.964.000 | **3203**  **HOK** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan saranan dan prasarana yang berfungsi dengan baik** | **100%** | 164.140.000 | APBD | 100% | 128.951.000 | 100% | 190.827.000 | 100% | 190.827.000 | 100% | 209.909.700 | **100%** |  |
| 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia | 4 Jenis | 108.660.000 | APBD | 4 jenis | 79.760.000 | 4 jenis | 117.158.000 | 4 jenis | 117.158.000 | 4 jenis | 128.873.800 | **20 jenis** |  |
| 1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya Gedung Kantor | 1 Unit | 2.080.000 | APBD | 1 unit | 3.006.000 | 1 unit | 29.205.000 | 1 unit | 29.205.000 | 1 unit | 32.125.500 | **1 unit** |  |
| 1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan | 3 unit | 23.900.000 | APBD | 4 unit | 15.160.000 | 4 unit | 19.615.000 | 4 unit | 19.615.000 | 4 unit | 21.576.500 | **4 Unit** |  |
| 1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan | 3 jeni | 30.300.000 | APBD | 3 jenis | 31.025.000 | 3 jenis | 22.921.000 | 3 jenis | 22.921.000 | 3 jenis | 25.213.100 | **3 jenis** |  |
| 1. PemeliharaanRutin/Berkala Mebeleur | Jumlah Mebeleur yang mendapat pemeliharaan | 2 jenis | 1.200.000 | APBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2 Jenis** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur** | **Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur** | **100%** | 3.000.000 | APBD | 100% | 3.000.000 | 100% | 15.904.000 | 100% | 15.904.000 | 100% | 17.494.400 | **100%** |  |
| 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah sumberdaya yang pendapat pelatihan formal | 5 org | 3.000.000 | APBD | 5 org | 3.000.000 | 7 org | 15.904.000 | 7 org | 15.904.000 | 7 org | 17.494.400 | **7 org** |  |
|  |  |  |  |  | 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan |  | 0 | 0 |  | 0 org | 0 | 0 org | 0 | 0 org | 0 | 0 org | 0 | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel** | **100%** | 5.537.000 | APBD | 100% | 5.583.000 | 100% | 102.818.000 | 100% | 102.818.000 | 100% | 113.099.800 | **100%** |  |
| 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun, tepat waktu dan akuntabel | 8 buku | 3.267.000 | APBD | 8 buku | 3.477.000 | 7buku | 74.018.000 | 7 buku | 74.018.000 | 8 buku | 81.419.800 | **38 Buku** |  |
| 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel | 7 buku | 2.270.000 | APBD | 7 buku | 2.106.000 | 7 buku | 28.800.000 | 7 buku | 28.800.000 | 7 buku | 31.680.000 | 35 Buku |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Program Pendidikan Politik** | **Cakupan masyarakat yang mendapat**  **kan pendidikan politik** | **100%** | 125.230.000 | APBD | 100% | 601.068.000 | 100% | 691.312.000 | 100% | 691.312.000 | 100% | 745.443.200 | **100%** |  |
| 1. Penyuluhan Kepada Masyarakat | Jumlah kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat | 7 kali | 54.000.000 | APBD | 7 kali | 398.348.000 | 7 kali | 556.978.000 | 7 kali | 556.978.000 | 7 kali | 597.675.800 | **35 kali** |  |
| 1. Pembinaan Administrasi Parpol dan Pelaporan | Jumlah rakor pembinaan administrasi Parpol | 2 rakor | 71.230.000 | APBD | 2 rakor | 202.720.000 | 2 rakor | 134.334.000 | 2 rakor | 134.334.000 | 2 rakor | 147.767.400 | **10 rakor** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Program Pemeliharaan Kamtrantib**  **mas** | **Cakupan penanganan pemelihara**  **an kamtrantib**  **mas dan pencegahan tindak kriminal** | **100%** | 170.350.000 | APBD | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 % |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Tindak Kriminal | Jumlah kegiatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan tindak kriminal | 4 kali | 170.350.000 | APBD |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 % |  |
| 1. Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa | Jumlah kegiatan sosialisasi tentang pengamanan Pamswakarsa kepada masyarakat | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1. Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) | Jumlah sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1. Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dalam rangka Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri | Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dalam rangka Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Program Peningkatan Kewaspadaan Daerah** | **Cakupan Pencegahan Dan Tangkal Dini Potensi Konflik** | **0** | 0 |  | 100% | 442.261.000 | 100% | 1.365.314.000 | 100% | 1.365.314.000 | 100% | 1.416.845.400 | **100%** |  |
| 1. Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Tindak Kriminal | Jumlah kegiatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan tindak kriminal | 0 | 0 |  | 2 Sosialisasi | 274.000.000 | 2 Sosialisasi | 1.131.038.000 | 2 Sosialisasi | 1.131.038.000 | 2 Sosialiasasi | 1.159.141.800 | **8 Sosialisasi** |  |
| 1. Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksana   an siskam swakarsa | Jumlah kegiatan sosialisasi tentang pengamanan Pamswakarsa kepada masyarakat | 0 | 0 |  | 3 Sosialisasi | 168.261.000 | 3 Sosialisasi | 234.276.000 | 3 Sosialisasi | 234.276.000 | 3 Sosialisasi | 257.703.600 | **20 Sosialiasasi** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Program Pengembang an Wawasan Kebangsaan** | **Cakupan pendidikan Wawasan Kebangsaan** | **100%** | 388.540.000 | APBD | 100% | 315.435.000 |  | 340.489.000 |  | 340.489.000 |  | 374.537.900 | **100%** |  |
| 1. PeningkatanToleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama | Jumlah kegiatan sosialisasi Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama | 4 sosialiasasi | 92.345.000 | APBD | 4 Sosialisasi | 117.820.000 | 4 Sosialisasi | 161.561.000 | 4 Sosialisasi | 161.561.000 | 4 Sosialisasi | 177.717.100 | **20 Sosialiasasi** |  |
| 1. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat | Jumlah kegiatan sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di kalangan Masyarakat | 4 Sosialisasi | 296.195.000 | APBD |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 Sosialisasi |  |
| 1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai2 luhur budaya bangsa | Jumlah kegiatan sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai2 luhur budaya bangsa | 0 | 0 |  | 4 Sosialisasi | 197.615.000 | 4 Sosialisasi | 178.928.000 | 4 Sosialisasi | 178.928.000 | 4 Sosialisasi | 196.820.800 | 16 Sosialisasi |  |
| 1. Sosialisasi Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyara katan | Jumlah kegiatan Sosialisasi Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 |  |
| 1. Identifikasi, Inventarisa si dan verifikasi keberadaan serta bantuan fasilitasi Ormas | Jumlah kegiatan identifikasi inventarisasi dan verifikasi keberadaan serta bantuan fasilitasi Ormas | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 |  |
| 1. Peningkat an Kesadaran Masyara kat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa | Jumlah sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa | 100% | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Program Kemitraan Pengembang an Wawasan Kebangsaan** | **Cakupan forum-Forum dan Organisasi-Organisasi tentang Wawasan Kebangsaan** | 0 | 0 |  | 100% | 383.933.000 | 100% | 279.860.000 | 100% | 279.860.000 | 100% | 307.846.000 | 100% |  |
| 1. Pembentukan Forum Pembaur an Kebangsa an (FPK) | Jumlah terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan | 100% | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 1. Bimtek RANHAM | Jumlah peserta bimtek RANHAM | 100% | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 1. Fasilitasi Forum Keagama an dan Forum Kemasyarakatan lainnya dalam upaya peningkat an wawasan kebangsa an | Jumlah kegiatan sosialisasi dan rakor bagi forum keagamaan dan Forum Kemasyarakatan | 0 | 0 |  | 4 sosialisasi | 255.948.000 | 4 sosialisasi | 144.603.000 | 4 sosialisasi | 144.603.000 | 4 sosialisasi | 159.063.300 | 20 Sosialisasi |  |
| 1. Seminar, Talk show, diskusi peningkat an wawasan kebangsa an | Jumlah kegiatan sosialisasi dan rakor peningkatan wawasan kebangsaan | 0 | 0 |  | 5 Sosialisasi | 127.985.000 | 5 Sosialisasi | 135.257.000 | 5 Sosialisasi | 135.257.000 | 5 Sosialisasi | 148.782.700 | 20 Sosialisasi |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** | **Cakupan Penanganan Kasus Pelanggaran Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** | **100%** | 55.330.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 |  |
|  | 1. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan | Terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan tentang terkendalinya harga-garga bahan pokok | 100% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 |  |
| **TOTAL** | | | | | | |  | 1.460.355.839 |  |  | 2.551.664.000 |  | 3.551.664.000 |  | 3.551.664.000 |  | 3.806.797.200 |  |  |

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIkK

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program prio . Guna mendapatkan “sekumpulan” program prioritas yang inheren disetiap strategi, dibutuhkan kebijakan umum. Program- program prioritas di masing-masing strategi merupakan program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaiannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran. Perumusan prioritas program pembangunan daerah merupakan rencana pembangunan yang konkret dalam bentuk program unggulan yang secara khusus berhubungan dengan **visi dan misi pembangunan Kepala Daerah terpilih. Dalam mewujudkan** capaian keberhasilan pembangunan,

Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan beberapa program unggulan yang menjadi prioritas pembiayaan yang wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Penetapan program prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah khususnya untuk bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** | **Program** |
| Meningkatnya kerukunan kehidupan umat beragama. | Menginisiasi forum-forum kerukunan antar umat  beragama | Memfasilitasi kebijakan yang memperkuat  kerukunan umat beragama dalam suasana saling menghormati; | * + 1. Program Peningkatan Kewaspadaan Daerah; |
| * + 1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; |
| * + 1. Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. |

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel 6.1, sebagai beriku

Tabel 6.1

Indikator Kinerja

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | INDIKATOR SASARAN RPJMD | KONDISI AWAL RPJMD TH. 2017 | TARGET INDIKATOR KINERJA | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TH. 2021 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Persentase  konflik sosial  yang terfasilitasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan gambaran yang memuat rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang selama 5 (lima) tahun, yang disusun setelah ditetapkannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021.

Rencana Strategis sangat penting artinya sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan *(stakeholders)* dalam menciptakan *Good Governance*, khususnya di bidang kesatuan bangsa dan politik yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, khususnya sebagai implementasi dari misi kesatu.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dibuat untuk digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang.

Demikian untuk dilaksanakan.

**WAKIL BUPATI MALANG,**

**SANUSI**